

# SEKTOR JASA KEUANGAN TETAP RESILIEN DAN KONTRIBUTIF DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

“Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga stabil dengan kinerja intermediasi yang kontributif, didukung oleh likuiditas yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat”

## PERKEMBANGAN INDIKATOR PEREKONOMIAN

### Global



Kinerja ekonomi Amerika Serikat tercatat solid dan di atas ekspektasi, sehingga inflasi masih cenderung *sticky*.



The Fed tetap mempertahankan rencana penurunan FFR sebesar 75bps di tahun 2024. Pasar memperkirakan European Central Bank akan menurunkan suku bunga 125bps dan Bank of England sebesar 75bps. Bank of Japan menaikkan suku bunga sebesar 10bps.



Rilis beberapa kinerja ekonomi Tiongkok di atas ekspektasi pasar dengan kebijakan fiskal dan moneter tetap akomodatif.

### Domestik



Inflasi mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga pangan, namun inflasi inti terjaga stabil. Hal ini diharapkan menjadi indikasi pemulihan permintaan ke depan.



Indikasi awal pemulihan konsumsi domestik juga terlihat dari peningkatan impor barang konsumsi yang cukup signifikan pada Februari 2024.



Kinerja sektor manufaktur juga tercatat terus membaik.



Perlu terus dicermati tren penurunan surplus neraca perdagangan seiring berlanjutnya kontraksi ekspor dan peningkatan kebutuhan impor.

### PASAR MODAL

**IHSG**  
**7.288,81**  
Mar'24 0,22% ytd

**Jumlah Investor**  
**12,63Juta**  
Mar'24

**Nilai Penghimpunan Dana**  
**48,04 T**  
Mar'24

**NAB Reksa Dana**  
**488,73 T**  
Mar'24

**Emiten Baru**  
**15**  
Mar'24

### Securities Crowdfunding (SCF)

Maret 2024



**17**  
penyelenggara berizin OJK

**517**  
penerbit

**Rp 1,09 Triliun**  
total dana yang dihimpun

**170.923**  
pemodal

### Perdagangan Karbon

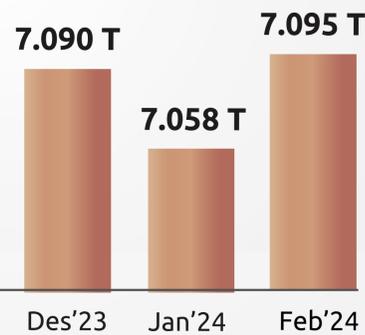
26 September 2023 s.d Maret 2024

**Rp35,30 miliar**  
Akumulasi Nilai Perdagangan

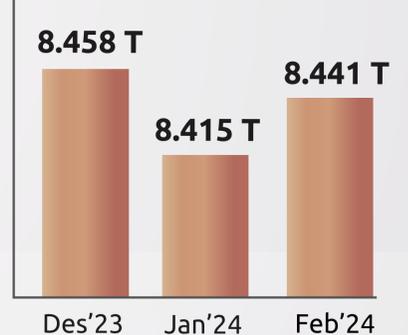
**571.956 tCO2e**  
Volume Unit

### PERBANKAN

**Kredit**  
11,28% yoy



**Dana Pihak Ketiga**  
5,66% yoy



### Kredit Investasi

**11,82%**  
yoy  
Feb'24

### Kredit Modal Kerja

**12,04%**  
yoy  
Feb'24

### Kredit Konsumsi

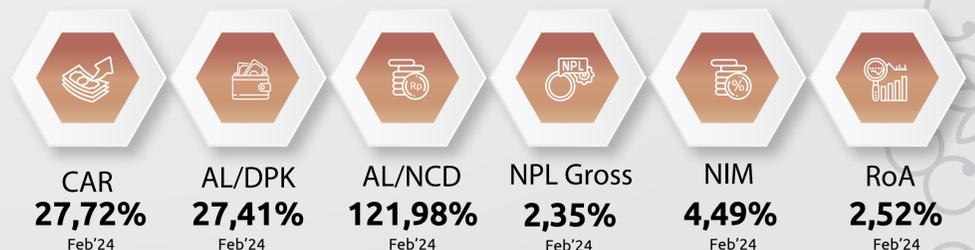
**9,54%**  
yoy  
Feb'24

### Kredit restrukturisasi Covid-19

**Nominal Kredit**  
Jan'24 **251,21 T**  
Feb'24 **242,80 T**

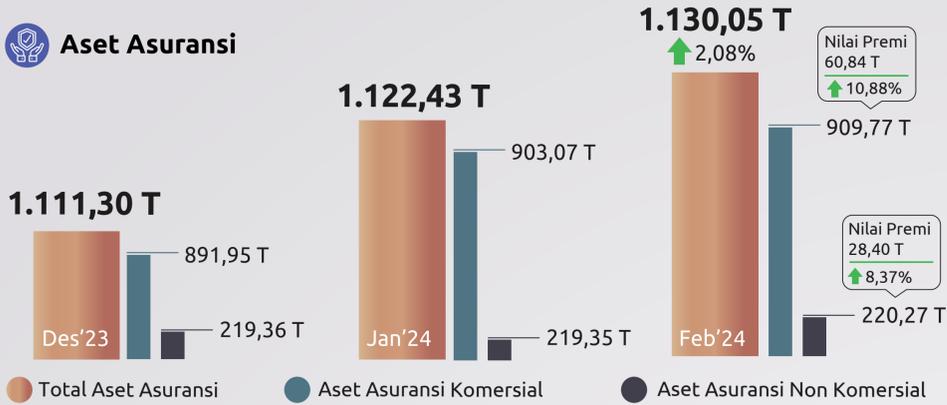
**Jumlah Debitur**  
Jan'24 **977 ribu nasabah**  
Feb'24 **943 ribu nasabah**

masa relaksasi kredit restrukturisasi Covid-19 berakhir pada Maret 2024



PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSUIN (PPDP)

Aset Asuransi

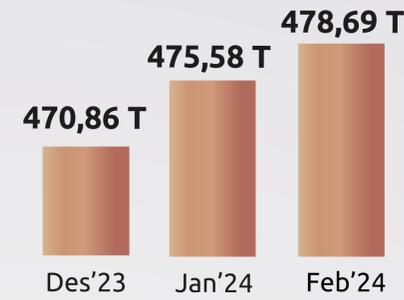


Aset Dana Pensiun

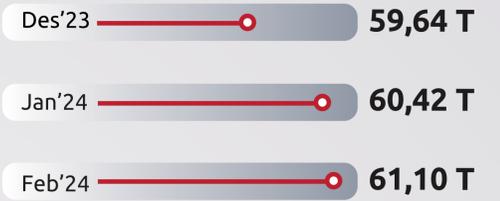


LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML)

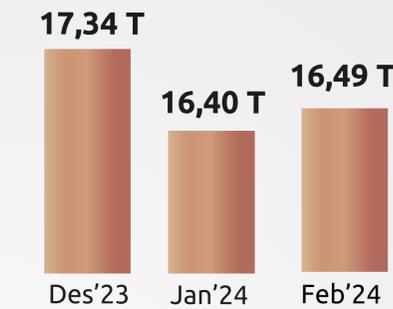
Piutang Pembiayaan



Outstanding Pembiayaan Fintech P2P Lending



Pembiayaan Modal Ventura



TWP 90 Fintech P2P Lending

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan

NPF Perusahaan Pembiayaan (gross)

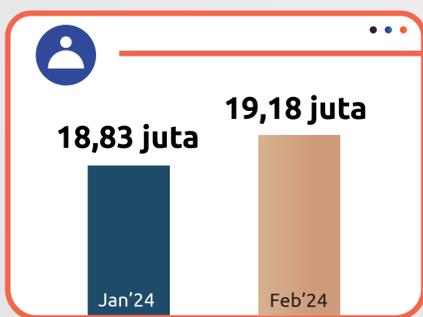
INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO (IAKD)

52 Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan yang tercatat di OJK

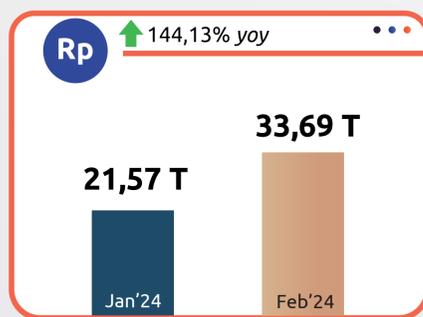


Aset Kripto

Jumlah Investor



Transaksi Kripto



PERKEMBANGAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN (PEPK)

Program literasi dan edukasi keuangan



Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

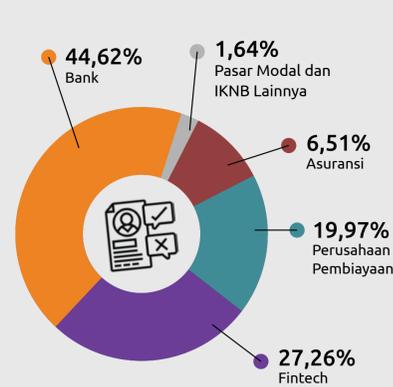


Pelatihan dan Pendampingan UMKM dalam rangka Gernas Bangsa Buatan Indonesia/Bangga Berwisata di Indonesia kepada 1.373 UMKM di Sumatera Selatan

Program Pelindungan Konsumen dan Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

413.414 Layanan Konsumen

29.623 pengaduan APPK



1.369 pengaduan berindikasi pelanggaran; 3.070 sengketa ke LAPS SJK

90,83% selesai melalui Internal Dispute Resolution  
1 Januari 2023 - 22 Maret 2024

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal



(s.d 28 Maret 2024)

8.462 Jumlah entitas ilegal dihentikan  
(2017 s.d 28 Maret 2024)

Penegakan Hukum Ketentuan Pelindungan Konsumen berupa Sanksi Peringatan Tertulis, Sanksi Denda, dan Surat Perintah serta penggantian kerugian konsumen oleh PUJK.

# ARAH KEBIJAKAN OJK



## Kebijakan Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

- Seiring dengan aktivitas ekonomi yang membaik pasca pandemi dan semakin menurunnya kebutuhan atas kebijakan restrukturisasi kredit, OJK mengakhiri kebijakan relaksasi yang diberikan untuk memitigasi *scarring effect* pandemi, termasuk kebijakan restrukturisasi kredit di bidang Perbankan akibat dampak lanjutan Covid-19 yang berakhir pada 31 Maret 2024.
- Akan menerbitkan perubahan POJK mengenai Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (Tematik Stabilitas Sistem Keuangan/SSK) yang ditujukan untuk mendukung terlaksananya penguatan pengawasan dan penanganan permasalahan Bank melalui respons kebijakan yang relevan, tepat waktu, dan tepat substansi.



## Kebijakan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (SJK) dan Infrastruktur Pasar

- Memberikan penyesuaian batas waktu penyampaian laporan industri jasa keuangan kepada OJK akibat adanya hari libur nasional dan cuti bersama.
- Telah menerbitkan ketentuan internal tentang Pedoman Pengawasan terhadap Bank sebagai Penyalur Kredit Usaha Rakyat.
- Akan menerbitkan POJK tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bagi Bank Umum Konvensional.
- Dalam proses finalisasi RPOJK Strategi *Antifraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK).
- Dalam proses finalisasi RPOJK BPR dan BPRS (Tematik Kelembagaan), untuk menata kembali industri BPR dan BPRS dari aspek kelembagaan dan diharapkan dapat memperkuat struktur, meningkatkan daya saing dan permodalan sebagai amanat UU P2SK.
- Akan meluncurkan *Roadmap* Penguatan dan Pengembangan BPR dan BPRS (RP2B) 2024-2027.
- Telah menerbitkan POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.
- Sedang memfinalisasi RPOJK Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.
- Dalam proses penyusunan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028.
- Dalam proses penyusunan penyesuaian ketentuan mengenai Penilaian Investasi Dana Pensiun.
- Akan dibentuk *Database* Polis Asuransi Nasional.
- Telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan (PP) periode 2024-2028.
- Penyusunan peraturan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan (RPOJK Satgas) sebagai tindak lanjut Pasal 247 UU PPSK.



## Pengembangan dan Penguatan SJK Syariah

- Telah menyusun Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah dan Pedoman Kerjasama BPRS dengan Penyelenggara LPBBTI Syariah (*Fintech P2P Financing*).
- Dalam proses penyusunan pedoman lebih rinci mengenai proses *spin-off* Asuransi Unit Syariah melalui RSEOJK mengenai Pemisahan Unit Syariah
- program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2024 yang merupakan kampanye nasional keuangan syariah selama Bulan Ramadan.



## Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD)

- Memproses pendaftaran bagi Penyelenggara ITSK dari klaster model bisnis *Innovative Credit Scoring* (ICS) yang telah ditetapkan untuk diatur dan diawasi oleh OJK.
- Akan menerbitkan POJK mengenai Peningkatan Kredit Alternatif yang mengatur dan mengawasi aktivitas terkait peningkatan kredit alternatif.
- Akan menerbitkan POJK mengenai Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.
- Dalam proses perumusan kebijakan terkait penerapan *Artificial Intelligence* di sektor keuangan, termasuk sektor ITSK.



## Penguatan Tata Kelola

- Menerima penghargaan dari KPK sebagai peringkat I Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik Nasional dan Program Pengendalian Gratifikasi Terbaik pada kategori Kementerian/Lembaga untuk tahun 2023.
- Mempertahankan 100 persen pemenuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK sesuai dengan target waktu pada Maret tahun 2024.
- Mendorong penguatan peran profesi manajemen risiko dalam *Kick-Off Meeting* Profesi Manajemen Risiko SJK Tahun 2024.
- Menyelenggarakan forum penguatan fungsi GRC bekerjasama dengan IAI untuk meningkatkan kualitas, kapabilitas dan pengembangan *best practice* standar akuntansi di Sektor Jasa Keuangan.
- Menyelenggarakan *Governansi Insight Forum* melibatkan Kementerian/Lembaga terkait untuk membahas praktik-praktik terbaik dalam penegakan integritas.



## Perkembangan Penyidikan

- Penyidik OJK telah menyelesaikan total 119 perkara yang terdiri dari 94 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan 20 perkara IKNB.
- 105 perkara telah diputus oleh pengadilan (99 perkara *in kracht* dan 6 perkara tahap kasasi)

Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil, OJK optimis sistem keuangan dapat terjaga stabil.